

ANALISIS KASUS

123 MAHASISWA DIKABARKAN POSITIF COVID-19

USAI IKUT DEMO TOLAK UU CIPTA KERJA

Nama : Nurul Sagita

NPM : 2413053210

Kelas : 2F

➤ **Menganalisis Kasus dari Artikel “"123 Mahasiswa Dikabarkan Positif Covid-19 Usai Ikut Demo Tolak UU Cipta Kerja, Ini Sebarannya..."**

Soal:

1. Bagaimanakah tanggapanmu mengenai isi dari berita tersebut? Hal positif apa yang bisa anda ambil dari kejadian tersebut?
2. Bagaimanakah menurut pendapatmu mengenai tata cara mengemukakan pendapat di tempat umum seperti demonstran yang merusak fasilitas umum saat menyampaikan orasinya tetapi merasa tidak bersalah meskipun telah jelas-jelas merusak dan bagaimanakah cara menyalurkan aspirasi yang lebih baik di tengah pandemi Covid-19?
3. Bagaimanakah solusimu mengenai permasalahan benturan kepentingan antara pengusaha dan buruh dalam konteks tetap mengedepankan antara hak dan kewajiban yang seimbang?
4. Jelaskan hal yang perlu diperbaiki dalam rangka menjunjung tinggi hak dan kewajiban antara negara dan warga negara sehingga mewujudkan kehidupan yang harmoni dalam konsep bermasyarakat, berbangsa dan bernegara?

Jawab:

1. Tanggapan saya mengenai isi dari berita tersebut, yaitu saya memiliki 2 sudut pandang dari sisi kesehatan dan sisi sosial politik. Dari sisi kesehatan, aksi unjuk rasa di tengah pandemi memang meningkatkan risiko penularan Covid-19, sebagaimana disebutkan oleh para ahli epidemiologi. Fakta bahwa ada ratusan mahasiswa dan demonstran yang

dinyatakan reaktif atau positif Covid-19 menunjukkan bahwa kerumunan besar di ruang publik tanpa protokol kesehatan yang ketat bisa memperburuk penyebaran virus. Namun, dari sisi sosial dan politik, demonstrasi ini juga mencerminkan bagaimana masyarakat, khususnya mahasiswa dan buruh, berupaya menyuarakan aspirasi mereka terkait UU Cipta Kerja. Ini adalah bentuk partisipasi demokrasi yang penting dalam negara hukum.

Kemudian, hal positif yang dapat diambil dari kejadian tersebut adalah bentuk rasa peduli dari para demonstran terhadap kebijakan yang memengaruhi kehidupan mereka. Ini menunjukkan bahwa demokrasi masih hidup dan ada keterlibatan aktif dari rakyat dalam mengawasi pemerintah. Selain itu, peristiwa ini juga menegaskan bahwa dalam situasi seperti pandemi, penting bagi semua pihak baik demonstran, aparat, maupun pemerintah untuk lebih disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan agar aspirasi tetap bisa disampaikan tanpa membahayakan kesehatan masyarakat.

2. Sebenarnya, kebebasan berpendapat dan berekspresi di tempat umum adalah hak fundamental. Namun, dalam hal ini mengenai tata cara mengemukakan pendapat di tempat umum, seperti demonstran yang merusak fasilitas umum saat menyampaikan orasinya tetapi merasa tidak bersalah bukanlah bentuk ekspresi yang bisa dibenarkan. Cara menyalurkan aspirasi yang lebih baik di tengah pandemi Covid-19, yaitu Menyalurkan aspirasi di tengah pandemi Covid-19 bisa dilakukan dengan berbagai cara yang lebih aman dan tetap efektif. Salah satunya adalah melalui kampanye digital dan media sosial. Dengan memanfaatkan platform seperti *Twitter*, *Instagram*, dan *Facebook*, pesan dapat disebarluaskan tanpa harus berkerumun. Infografis, video edukatif, serta tulisan berbasis data dapat membantu menarik perhatian masyarakat dan pemangku kebijakan. Menyampaikan aspirasi secara langsung kepada pemerintah, juga bisa dilakukan dengan mengajukan audiensi daring. Mengirim surat resmi atau kajian akademik yang berisi data dan solusi konkret dapat menjadi bentuk advokasi yang lebih terstruktur.
 3. Agar keseimbangan antara hak dan kewajiban tetap terjaga, solusi yang bisa diterapkan meliputi pendekatan dialogis, regulasi yang adil, serta peningkatan kesejahteraan bersama.
- Pertama, dialog dan mediasi antara pengusaha dan buruh harus diperkuat. Komunikasi yang terbuka melalui perundingan bersama antara serikat pekerja dan manajemen

perusahaan dapat menjadi solusi dalam menemukan jalan tengah yang menguntungkan kedua belah pihak. Dengan adanya forum diskusi yang rutin, kebijakan dapat disusun secara transparan tanpa mengesampingkan kepentingan buruh maupun kelangsungan usaha.

- Kedua, regulasi yang adil dan fleksibel perlu ditegakkan. Pemerintah harus memastikan bahwa kebijakan ketenagakerjaan, seperti Undang-Undang Ketenagakerjaan, memberikan perlindungan bagi buruh tanpa menghambat iklim investasi. Misalnya, aturan mengenai upah minimum harus memperhitungkan kondisi ekonomi, produktivitas, serta daya beli pekerja agar tidak merugikan salah satu pihak.
4. Untuk mewujudkan kehidupan yang harmonis dalam konsep bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, diperlukan perbaikan dalam beberapa aspek yang menjunjung tinggi keseimbangan antara hak dan kewajiban baik dari sisi negara maupun warga negara. Aspek tersebut yaitu, penegakan hukum yang adil dan transparan, serta meningkatkan kesadaran warga negara terhadap hak dan kewajiban. Dengan perbaikan di aspek-aspek tersebut, keseimbangan antara hak dan kewajiban negara dan warga negara dapat terwujud, menciptakan kehidupan yang harmonis dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.